

## BAB II

### KONDISI SISTEM PEMERINTAHAN NEPAL

Republik Federal Demokratik Nepal atau dalam bahasa Nepali bernama *Sanghiya Loktāntrik Ganatantra Nepāl* adalah negara dengan ibukota Kathmandu yang terletak di kawasan pegunungan Himalaya. Nepal berbatasan langsung dengan Republik Rakyat China atau RRC/Tiongkok di sebelah utara dan India di barat, timur, dan selatan. Negara Nepal awalnya dibentuk melalui Persatuan Nepal pada tanggal 21 Desember 1768 dengan mengangkat raja pertama bernama Prithvi Narayan Shah. Nepal dijajah oleh Inggris dan merdeka pada 21 Desember 1923. Sebelumnya, negara yang terletak di Himalaya ini berstatus protektorat setelah kalah melawan Inggris dalam perang tahun 1815. Pada tahun 1990, Nepal mengubah sistem pemerintahan menjadi monarki konstitusional. Kemudian pada tahun 2008 kerajaan Nepal resmi dibubarkan dan Nepal berubah menjadi negara republik federal yang sekuler.

#### A. Dinamika Sistem Pemerintahan Nepal

Sebelum terbentuknya negara Nepal yang dipimpin oleh raja pertamanya [Prithvi Narayan Shah](#), jauh pada tahun-tahun sebelum masehi terdapat banyak kerajaan-kerajaan kecil yang tersebar di sekitar pegunungan Himalaya. Kerajaan-kerajaan tersebut lalu berusaha ditaklukkan oleh [Prithvi Narayan Shah](#) pada pertengahan abad ke-18 menggunakan metode kerja sama maupun dengan cara berperang. Metode ini akhirnya berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan kecil tersebut dengan keyakinan pada [Prithvi Narayan Shah](#) yang menyatakan bahwa dia akan mendedikasikan dirinya yang masih berusia muda untuk mewujudkan kerajaan yang damai di Lembah Kathmandu.<sup>1</sup>[Prithvi Narayan Shah](#)

---

<sup>1</sup> Giuseppe, Father. 2012. *Account of the Kingdom of Nepal*. Asiatick Researches. London: Vernor and Hood. Hlm. 308

adalah raja yang terlahir dari keluarga Hindu. Pada masa pemerintahannya, [Prithvi](#) menggunakan metode pengucilan dan pengusiran orang-orang Eropa yang berada di kerajaannya. Prithvi juga mengusir para misionaris *Capuchin* yang telah banyak berkontribusi positif dalam memajukan pemikiran masyarakat kerajaan serta telah banyak menginvestasikan hartanya dalam bentuk tanah di kerajaan tersebut. Prithvi juga mengusir pedagang Kashmir dari kerajaannya dan kemudian menyatakan bahwa Nepal adalah kerajaan Hindu yang murni. Prithvi juga menyarankan agar masyarakatnya mengikuti peraturan kemurnian dari tradisi nenek moyang mereka yang disebut dengan *dharma*.<sup>2</sup>

Pada masa kekuasaan Raja Prithvi, perkembangan ekonomi lokal sangat ditekankan kepada masyarakatnya. Prithvi menyatakan bahwa jika para pedagang asing memasuki Nepal, mereka akan mengambil alih segala bidang dan menghisap segala potensi negara tersebut tanpa tersisa. Selain itu, Prithvi melarang masyarakatnya mengenakan produk pakaian asing dan juga melatih masyarakatnya untuk menenun pakaian mereka sendiri. Dia percaya bahwa dengan demikian, kekayaan lokal tidak akan diambil alih oleh masyarakat asing. Prithvi juga kemudian menekankan penjualan rempah-rempah ke luar negeri dan mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya untuk kemudian dihabiskan pada produk di dalam negeri. Pernyataan Raja Prithvi yang terkenal adalah “jika masyarakatnya mampu (dalam segi ekonomi), maka kerajaan juga akan lebih kuat.”<sup>3</sup>

Pada kebijakan keamanannya, Prithvi Narayan Shah menekankan pada pembangunan benteng. Dia menyarankan untuk membangun satu benteng yang kokoh masing-masing di kota kecil seperti Shivapuri,

---

2 Acharya, Baburam, Naraharinath, dan Yogi. 2014.

*Badamaharaj Prithivi Narayan Shah ko Divya Upadesh (Reprint ed.)*. Kathmandu: Shree Krishna Acharya. ISBN 99933-912-1-2

Phulchowki, Chandragiri, Mahadevpokhari, Palung, Daapcha, dan Kaahule serta menempatkan meriam di masing-masing dari benteng tersebut dalam keadaan siap. Konstruksi pintu besi di Bhanjyangs dan penempatan meriam di setiap pintu itu, masing-masing dalam keadaan siap juga didukung oleh Prithvi Narayan Shah, yang dia yakini akan menjaga negara itu aman dari mata-mata, pengungsi, pembunuh, dan lain sebagainya.

Raja Prithvi Narayan Shah berhasil menyatukan beberapa kerajaan-kerajaan kecil masuk ke dalam kekuasaannya di kerajaan Gorkha. Pada bulan Januari 1775, pada usia 52 tahun, Prithvi Narayan Shah meninggal di Devighat, Nuwakot. Setelah kematiannya, putranya bernama Pratap Singh Shah menggantikannya dan kampanye penyatuan kerajaannya dilanjutkan oleh putranya yang lebih muda bernama Bahadur Shah.

Setelah kematian Prithvi Narayan Shah, dinasti Shah mulai memperluas kerajaan mereka menjadi apa yang sekarang disebut India Utara. Antara 1788 dan 1791, Nepal menginvasi Tibet dan merampok Biara Tashi Lhunpo dari Shigatse. Tibet mencari bantuan dari Cina dan Kaisar Qianlong dari Dinasti Qing Tiongkok menunjuk Fuk'anggan sebagai panglima kampanye Tibet. Kerusakan berat terjadi di kedua sisi. Pasukan Nepal terpaksa mundur selangkah demi selangkah ke Nuwakot untuk merentangkan kekuatan Sino-Tibet. Cina melancarkan serangan ke atas di siang hari dan gagal berhasil karena serangan balik yang kuat dengan Khukuri di Nuwakot.

Tentara Tiongkok mengalami kemunduran besar ketika mereka mencoba menyeberangi Betrawati yang diterjang musibah, dekat dengan istana Gorkhali di

Nuwakot.<sup>4</sup> Sebuah kebuntuan terjadi ketika Fuk'anggan ingin melindungi pasukannya dan ingin bernegosiasi di Nuwakot. Perjanjian itu lebih menguntungkan pihak China di mana Nepal harus mengirim upeti kepada kaisar Tiongkok.

Pada abad ke-19, faksionalisme (perselisihan antara dua atau lebih argumen dalam sebuah kelompok) di antara kerajaan Nepal menyebabkan ketidakstabilan internal setelah terjadinya perang. Pada 1846, Ratu Rajendralakshmi berencana untuk menggulingkan Jang Bahadur, seorang pemimpin militer keturunan Rajput India yang berkuasa dengan cepat dan menghadirkan ancaman terhadap kekuasaan kerajaan Nepal. Rencana itu diketahui oleh Jang Bahadur dan menyebabkan beberapa ratus pangeran dan kepala suku dieksekusi setelah bentrokan bersenjata antara personel militer dan pasukan yang setia kepada ratu. Hal ini kemudian dikenal sebagai Pembantaian Kot. Bahadur akhirnya menang dan mendirikan dinasti Rana di kerajaan Nepal. Jabatan seorang raja hanyalah sebagai simbol, dan jabatan Perdana Menteri dijadikan sangat kuat dan turun-temurun dipegang oleh Ranas (keturunan dinasti Rana).

Jung Bahadur Rana mengirim pasukan yang dipimpin oleh saudara-saudaranya bernama Bam Bahadur Kunwar Rana dan Dhir Shamsher Rana untuk menyerang Tibet lagi untuk mencapai kemenangan penuh. Pasukannya berhasil mengalahkan pasukan Tibet di dua sisi. Tim Tibet tiba pada Januari 1856 untuk menandatangani perjanjian. Setelah sebulan, Perjanjian Thapathali ditandatangani dan perjanjian kali ini lebih menguntungkan pihak Nepal daripada perjanjian sebelumnya.

Ketidakpuasan terhadap aturan dinasti Rana mulai muncul dari beberapa orang yang berpendidikan di

---

4 Stiller, L.F. 1975. *The Rise of The House of Gorkha*. Patna: Patna Jesuit Society

Nepal, mereka yang telah belajar di berbagai sekolah dan perguruan tinggi India, dan juga dari internal dinasti Rana itu sendiri, banyak di antara mereka terpinggirkan dalam peraturan hirarki Rana yang berkuasa saat itu. Banyak masyarakat Nepal yang merasa ketidakadilan ini secara aktif membantu perjuangan kemerdekaan pihak India yang dijajah oleh kerajaan Rana yang pro Inggris. Masyarakat yang memberontak ini juga ingin membebaskan Nepal dari pendudukan Rana yang bersifat otoriter. Partai-partai politik seperti The Prajaparisad dan Nepali Congress telah terbentuk di daerah-daerah yang diasingkan selama dinasti Rana berkuasa. Partai-partai ini dibentuk oleh para pemimpin partai itu sendiri yaitu B.P. Koirala, Ganesh Man Singh, Subarna Sumsher Rana, Krishna Prasad Bhattarai, Girija Prasad Koirala, dan banyak masyarakat Nepal yang berpikiran patriotik lainnya yang mendesak militer dan gerakan politik di Nepal untuk menggulingkan rezim Rana. Gejolak ini memuncak pada saat Raja Tribhuvan, keturunan langsung Prithvi Narayan Shah, melarikan diri dari istana yang menahan segala bentuk pergerakannya pada tahun 1950 menuju India yang baru merdeka, lalu ikut serta dalam pemberontakan bersenjata melawan pemerintahan Rana. Pemberontakan ini akhirnya berakhir dengan kembalinya keluarga Shah ke kekuasaan Nepal dan pengangkatan seorang non-Rana sebagai perdana menteri untuk pertama kalinya.

Setelah kekuasaan Rana hancur dan kembali pada kerajaan Nepal keturunan Shah, pemerintahan kerajaan Nepal kembali ke sistem di mana seorang raja yang memimpin kerajaan tidak hanya sebagai simbol dibantu oleh para pemimpin partai politik yang masih baru. Sepanjang tahun 1950-an, berbagai upaya dilakukan untuk menyusun konstitusi bagi Nepal yang akan membentuk sistem pemerintahan yang representatif, mengikuti sistem Inggris.

Pada awal 1959, putra Tribhuvan, Raja Mahendra, mengeluarkan percobaan konstitusi baru dan pemilihan umum demokratis pertama untuk majelis nasional diadakan. Partai Kongres Nepal, kelompok sosialis moderat, meraih kemenangan besar dalam pemilihan. Pemimpinnya, Bishweshwar Prasad Koirala, membentuk pemerintahan dan menjabat sebagai perdana menteri. Setelah bertahun-tahun berkuasa di antara raja-raja (Tribhuvan dan Mahendra) dan pemerintah, Mahendra membubarkan eksperimen demokrasi pada tahun 1960.

Mendeklarasikan kegagalan parlemen kontemporer, Raja Mahendra pada 1960 menolak pemerintahan Koirala, menyatakan bahwa sistem panchayat "tanpa partai" akan memerintah Nepal, dan mengumumkan konstitusi baru pada 16 Desember 1962. Setelah munculnya konstitusi baru tersebut, Perdana Menteri, anggota Parlemen dan ratusan aktivis demokrasi ditangkap. Penangkapan aktivis politik dan pendukung demokratis ini berlanjut selama periode 30 tahun penuh selama sistem Panchayat tanpa partai di bawah Raja Mahendra dan kemudian putranya, Raja Birendra.<sup>5</sup>

Konstitusi baru membuat sistem panchayats (dewan) tanpa partai, yang dianggap oleh Raja Mahendra sebagai bentuk pemerintahan demokratis lebih dekat dengan tradisi Nepal. Menggunakan struktur piramidal, tersusun dari majelis perdesaan hingga Rastriya Panchayat (Parlemen Nasional), sistem panchayat memusatkan kekuasaan absolut monarki dan menjadikan Raja sebagai kepala negara dengan otoritas tunggal atas semua lembaga pemerintahan, termasuk kabinet (Dewan Menteri) dan Parlemen.

---

5 Thapa, Ganga. 2015. *Peasant Movement with Special Reference to Agrarian Reform in Nepal (1950-1970)*. Lambert Academic Publishing. ISBN 978-3-659-76806-4

Pada tahun 1972 Raja Mahendra digantikan oleh putranya yang berusia 27 tahun bernama Raja Birendra. Di tengah demonstrasi mahasiswa dan kegiatan anti-rezim pada tahun 1979, Raja Birendra menyerukan referendum nasional untuk memutuskan sistem pemerintah Nepal mengenai kelanjutan dari sistem panchayat dengan reformasi demokratis atau menggantinya dengan pembentukan sistem multi-partai. Referendum diadakan pada Mei 1980 dan sistem panchayat memenangkan kemenangan tipis. Raja melaksanakan reformasi yang dijanjikan, termasuk pemilihan perdana menteri oleh Rastriya Panchayat (Parlemen Nasional).

Sistem Rastriya Panchayat ini tidak berjalan mulus seperti pada perencanaan awalnya, muncul kelompok anti Panchayat karena dianggap tidak menggambarkan sistem kenegaraan Nepal yang sesungguhnya yaitu berasaskan sistem kerajaan (sistem murni).<sup>6</sup> Adanya penyelewengan dana bantuan bencana gempa bumi pada Agustus 1991 oleh Marich Man Singh, perdana menteri Nepal saat itu juga menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem Panchayat ini.<sup>7</sup>

Selama masa Panchayat ini juga, perdana menteri mengizinkan adanya barang-barang impor dari China sebesar 40% dari keseluruhan total impor Nepal, menyebabkan merenggangnya hubungan India dan Nepal karena India merasa dirugikan atas keputusan ini.

---

6 Hoftun, Martin, William Raeper and John Whelpton. 1999. *People, Politics and Ideology: Democracy and Social Change In Nepal*. Kathmandu: Mandala Book Point.

7 Federal Research Division of the Library of Congress. *Country Studies*. The Panchayat System. <http://countrystudies.us/nepal/60.htm>. Diakses pada 23 November 2018.

Hubungan India dan Nepal sangatlah sensitif hingga lapisan masyarakat Nepal yang kemudian beberapa pihak dari partai-partai non pemerintah mengambil keuntungan dari ketidaknyamanan masyarakat akan perenggangan hubungan India dan Nepal ini. Kongres Nepal (NC) dan partai-partai tersebut menyalahkan pemerintah karena mengabadikan krisis dan tidak mengambil langkah serius untuk menyelesaikannya. Pada bulan Desember 1989, bertepatan dengan perayaan hari lahir pemimpin NC bernama Bishweshwar Prasad Koirala meluncurkan program untuk membantu masyarakat memahami keburukan dari sistem Panchayat. Aliansi NC, partai sayap kiri yang dikenal sebagai *United Left Front* (ULF) memperluas dukungannya kepada NC dalam kampanye untuk sistem kepartaian yang lebih maju.

Pada 18-19 Januari 1990, NC mengadakan konferensi di mana para pemimpin dari berbagai negara dan anggota pers asing diundang. Para pemimpin dari India, Kedutaan Besar AS serta Jerman Barat menghadiri konferensi itu, didukung pula oleh Jerman, Jepang, Spanyol, dan Finlandia. Terinspirasi oleh dukungan internasional dan gerakan demokratis yang terjadi di seluruh dunia setelah disintegrasi Uni Soviet pada tahun 1989, NC dan ULF meluncurkan sebuah gerakan massa bernama Jana Andolan (Gerakan Rakyat) pada 18 Februari untuk mengakhiri rezim Panchayat, dan pergantian pemerintahan sementara yang diwakili oleh berbagai partai politik dan masyarakat.<sup>8</sup> Untuk menghentikan gerakan tersebut, pemerintah menangkap para pemimpin tingkat nasional dan distrik dari NC dan ULF serta melarang semua surat kabar oposisi pemerintah. Selama protes ini banyak warga sipil

---

8 Thapliyal, Sangeeta. 2011. "*Crisis of Democracy in Nepal*". *The Institute for Defence Studies and Analyses*. <http://www.idsa-india.org/an-jul-6.html>. Diakses pada 23 November 2018.

terbunuh, salah satu dari para martir (pembela sistem *nvPanchayat*) itu adalah Ram Chandra Hamal, anggota Kongres Nepal yang dibunuh selama masa tahananannya.<sup>9</sup>

Pada akhir Februari polisi menembaki demonstran di Bhaktapur yang menewaskan 12 orang. Gerakan tersebut menjadi semakin besar dan berbahaya ketika ribuan mahasiswa berbaris melawan polisi pemerintah hingga ratusan mahasiswa tersebut ditangkap dan banyak pula yang terluka.<sup>10</sup>

Komunikasi antara anggota oposisi tersendat dan kepemimpinan pihak kerajaan istana terkadang tidak ada ketika akan dimulainya diskusi mengenai protes masyarakat ini. Ada pula yang telah meninggalkan pemerintah kerajaan untuk ikut bergabung dengan tim oposisi karena dianggap lebih sesuai untuk Nepal. Protes ini meningkat dari pedesaan hingga mencapai ibukota Nepal yaitu Kathmandu. Setelah tentara membunuh banyak demonstran di Patan pada awal April, gerakan itu mengumpulkan sekitar 200.000 orang untuk berbaris memprotes sistem monarki di Kathmandu.

Selama beberapa hari polisi menembak dan menewaskan lusinan pengunjung rasa yang memblokir jalanan, mencemooh polisi dan mengibarkan bendera yang menuntut pemulihan sistem demokrasi multipartai

---

9 Federal Research Division of the Library of Congress. *Country Studies. The Panchayat System*. <http://countrystudies.us/nepal/60.htm>. Diakses pada 23 November 2018

10 Global Nonviolent Action Database. *Nepalese Force King To Accept Democratic Reform, 'Jana Andolan' (People's Movement), 1990*. <https://nvdatabase.swarthmore.edu/content/nepal-ese-force-king-accept-democratic-reform-jana-andolan-peoples-movement-1990>. Diakses pada 24 November 2018.

yang dimiliki negara itu pada tahun 1950-an. Pada puncak protes, orang-orang mengepung gedung-gedung pemerintah, mendesak raja untuk menerima tuntutan mereka dengan menggunakan tindakan anarkis berupa perusakan mobil perdana menteri dan patung Raja Mahendra. Melihat terdesaknya posisi pemerintah, para pemimpin membatalkan protes dan memberi kesempatan pada kerajaan untuk mempertimbangkan keputusannya. Pada 8 April 1990, raja mencabut larangan atas partai politik.

Jana Andolan kemudian menyusun konstitusi pada bulan November 1990. Konstitusi ini memaksa penguasa sistem monarki Nepal, Raja Birendra Bir Bikram Shah Dev untuk menyerahkan keputusan pemerintah kepada rakyat Nepal. Raja Birendra yakin untuk menegakkan konstitusi baru rakyat, dan memperjelas posisi masyarakat sebagai sumber legitimasi politik dan memberikan jaminan hak-hak dasar dalam berpolitik. Pada saat itu warga negara Nepal yang berusia 18 tahun ke atas berhak untuk memilih pemimpinnya. Namun penyusunan konstitusi baru menghadapi banyak kesulitan karena adanya jurang antara kaum elit dan pemilih biasa di mana terdapat hampir 40% dari populasi mengalami buta aksara. Para pemimpin partai yang paling menonjol biasanya adalah warga kelas atas yang jarang peduli atau bergaul dengan bagian yang lebih besar dari penduduk Nepal yang memahami etnis Nepal secara mendalam. Kesenjangan besar ini meningkatkan kesulitan menciptakan sistem baru yang dapat diterima kedua kaum, baik untuk memodernisasi Nepal namun juga masih merangkul tradisi dan keyakinan tentang kasta di Nepal.<sup>11</sup>

---

11 Parajulee, P. Ramjee. 2000. *The Democratic Transition in Nepal*. United States: America Rowman & Littlefield Publisher, Inc.

Pada Mei 1991, Nepal menyelenggarakan pemilihan parlemen pertamanya dalam hampir 50 tahun. Kongres Nepal memenangkan 110 dari 205 kursi dan membentuk pemerintahan terpilih pertama dalam 32 tahun. Pada tahun 1992, dalam situasi krisis ekonomi dan kekacauan protes masyarakat, dengan kenaikan harga sebagai akibat dari implementasi perubahan kebijakan pemerintahan Kongres yang baru, kaum radikal kiri meningkatkan agitasi politik mereka. Komite Agitasi Rakyat Bersama dibentuk oleh berbagai kelompok. Pemogokan umum kemudian direncanakan oleh seluruh masyarakat pada 6 April 1992.

Insiden kekerasan mulai terjadi pada malam sebelum pemogokan. Pada fajar tanggal 6 April, bentrokan antara pemogokan aktivis dan polisi, di luar kantor polisi di Pulchok (Patan), menyebabkan dua aktivis mati. Pada hari itu juga, rapat umum Komite Agitasi di Tundikhel, di ibukota Kathmandu diserang oleh pasukan polisi. Akibatnya, kerusuhan meletus dan gedung Telekomunikasi Nepal dibakar. Polisi menembaki kerumunan, menewaskan beberapa orang. Organisasi Hak Asasi Manusia Nepal memperkirakan bahwa 14 orang, termasuk beberapa saksi telah tewas dalam tembakan polisi.<sup>12</sup>

Ketika reformasi daerah yang dijanjikan gagal muncul, orang-orang di beberapa distrik mulai mengatur strategi untuk memberlakukan reformasi daerah mereka sendiri dan untuk mendapatkan kekuasaan atas hidup mereka di tanah mereka. Namun, gerakan ini ditekan oleh pemerintah Nepal dalam Operasi Romeo dan Operasi Kilo Sera II, yang mengambil banyak nyawa aktivis perjuangan. Akibatnya, banyak saksi atas penindasan ini menjadi radikal.

---

12 Hoftun, Martin, William Raepfer and John Whelpton. 1999. *People, Politics and Ideology: Democracy and Social Change In Nepal*. Kathmandu: Mandala Book Point.

Pada Februari 1996, salah satu anggota partai Maois memulai upaya untuk menggantikan monarki parlementer dengan republik demokratik rakyat baru, melalui strategi revolusioner Maois yang dikenal sebagai perang rakyat, yang menyebabkan Perang Sipil Nepal. Dipimpin oleh Dr. Baburam Bhattarai dan Pushpa Kamal Dahal (lebih dikenal sebagai "Prachanda"), pemberontakan dimulai di lima distrik di Nepal, yaitu Rolpa, Rukum, Jajarkot, Gorkha, dan Sindhuli. Kaum Maois menyatakan eksistensi "pemerintahan rakyat" sementara di tingkat distrik di beberapa lokasi.

Pada 1 Juni 2001, Putra Mahkota Dipendra diduga melakukan penembakan, membunuh 9 anggota keluarga kerajaan, termasuk Raja Birendra dan Ratu Aishwarya, sebelum menembak dirinya sendiri. Karena kelangsungan hidupnya, ia sementara menjadi raja sebelum meninggal karena luka-lukanya, setelah itu Pangeran Gyanendra (saudara Birendra) mewarisi tahta, menurut tradisi.

Sementara itu, pemberontakan Maois meningkat, dan pada bulan Oktober 2002 raja secara temporer menggulingkan pemerintah dan mengambil kendali penuh atas hal itu.<sup>13</sup> Seminggu kemudian ia mengangkat pemerintahan lain, tetapi Nepal saat itu masih sangat tidak stabil karena perang saudara dengan Maois, berbagai upaya raja untuk mengambil kendali lebih dari pemerintah terus diluncurkan, dan munculnya kekhawatiran tentang kompetensi pengambilan tahta oleh putra Gyanendra dan pewarisnya Pangeran Paras.

## **B. Perjuangan dan Kondisi Demokratisasi Nepal**

---

13 Lawoti, Mahendra dan Anup K. Pahari. 2012. *The Maoist Insurgency in Nepal: Revolution in the Twenty-first Century (Routledge Contemporary South Asia Series) 1st Edition*. New York: Routledge.

Menghadapi pemerintahan yang tidak stabil dan pengepungan Maois di Lembah Kathmandu pada bulan Agustus 2004, dukungan mayoritas untuk monarki mulai berkurang. Pada 1 Februari 2005, Gyanendra memecat seluruh pemerintahan dan mengambil alih kekuasaan eksekutifnya tanpa nasihat menteri, menyatakan "keadaan darurat" untuk menumpas gerakan Maois. Politisi ditempatkan di bawah tahanan rumah, telepon dan garis internet dipotong, dan kebebasan pers sangat dibatasi.

Rezim baru raja membuat sedikit kemajuan dalam tujuan yang dinyatakannya untuk menekan para pemberontak. Uni Eropa menggambarkan pemilihan umum Nepal pada Februari 2006 sebagai "langkah mundur demokrasi", karena partai-partai besar memboikot pemilu dan tentara memaksa beberapa kandidat untuk mencalonkan diri.<sup>14</sup> Pada April 2006 pemogokan dan protes di Kathmandu memaksa raja untuk mengembalikan parlemen. Sebuah koalisi tujuh partai kembali mengendalikan pemerintah dan mengambil alih sebagian besar kekuasaannya. Pada 15 Januari 2007, sebuah sistem koalisi partai-partai di bawah konstitusi sementara mengatur Nepal.

Majelis Konstituante Nepal mulai berbuah pada tanggal 24 Desember 2007 ketika diumumkan bahwa monarki akan dihapuskan pada tahun 2008 setelah pemilihan Majelis Konstituante dan pada tanggal 28 Mei 2008, Nepal dinyatakan sebagai Republik Demokratik Federal hingga saat ini.<sup>15</sup> Tanggal 18 Mei telah dinamai Loktantrik Day (Democracy Day) oleh mayoritas masyarakat Nepal.

Pada 28 Mei 2008, Majelis Konstituante yang baru terpilih menyatakan Nepal sebagai Republik

---

14Hilton, Isabel. 2006. *When A King's Looking-Glass World Is Paid For In Blood*.

<https://www.theguardian.com/world/2006/feb/02/c>  
hina.eu. Diakses pada 27 November 2018

Demokratik Federal, menghapus sistem monarki yang telah bertahan selama 240 tahun. Gerakan untuk penghapusan monarki didukung oleh mayoritas besar anggota parlemen. Dari 564 anggota yang hadir di majelis, 560 memilih untuk setuju dan 4 anggota memilih menentangnya.<sup>16</sup> Pada tanggal 11 Juni 2008, mantan Raja Gyanendra meninggalkan istana.<sup>17</sup> Ram Baran Yadav dari Kongres Nepal menjadi Presiden pertama Republik Demokrasi Federal Nepal pada 23 Juli 2008. Demikian pula, Majelis Konstituante memilih Pushpa Kamal Dahal (dikenal sebagai Prachanda) dari Partai Komunis Terpadu Nepal (Maois) sebagai Perdana Menteri Republik pertama pada 15 Agustus 2008.

Setelah gagal menyusun konstitusi sebelum tenggat waktu yang diberikan, Majelis Konstituante yang berkuasa membubarkan diri pada 28 Mei 2012 dan membentuk pemerintahan sementara yang baru (2013-2014) yang dibentuk di bawah Perdana sekaligus Kepala

---

15 BBC News. 2007. *Nepalese Monarchy To Be Abolished*.

[http://news.bbc.co.uk/2/hi/south\\_asia/7158670.stm](http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7158670.stm). Diakses pada 27 November 2018.

16 Nepal News. 2008. *Nepal Becomes A Federal Democratic Republic*. File awal dari website nepalnews.com, diarsipkan pada laman

<https://web.archive.org/web/20160117050801/http://www.nepalnews.com/archive/2008/may/may28/news18.php>. Diakses pada 27 November 2018.

17 Nepal News. 2008. *Ex-King Gyanendra leaves Narayanhiti*. Diarsipkan pada laman

<https://web.archive.org/web/20081007111955/http://www.nepalnews.com/archive/2008/jun/jun11/news16.php> Diakses pada 27 November 2018.

Hakim Nepal, Hakim Agung pengadilan Khil Raj Regmi. Dalam pemilihan Konstituante pada bulan November 2013, Kongres Nepal memenangkan suara yang besar namun gagal mendapatkan suara mayoritas. Partai Komunis Nepal (Marxis-Leninis Bersatu) dan Kongres Nepal bernegosiasi untuk membentuk pemerintahan konsensus, dan Sushil Koirala dari Kongres Nepal terpilih sebagai Perdana Menteri pada Februari 2014 dengan dukungan dari Partai Komunis Nepal.

### **Konstitusi Nepal 2015**

Saat ini Nepal menggunakan Konstitusi baru yang mulai berlaku pada 20 September 2015, menggantikan Konstitusi Sementara yang diterapkan pada tahun 2007. Konstitusi Nepal 2015 ini terdiri atas 35 bab, 308 pasal dan 9 perencanaan. Konstitusi ini disusun oleh Majelis Konstituante Kedua setelah adanya kegagalan Majelis Konstituante Pertama untuk menghasilkan konstitusi dalam periode mandat setelah terjadinya bencana gempa bumi yang sangat besar pada April tahun 2015.

Konstitusi didukung oleh 90% dari total anggota legislatif. Dari 598 anggota, 538 memilih mendukung konstitusi sementara 60 orang memilih menentangnya, termasuk beberapa partai politik yang tidak ikut serta dalam proses pemungutan suara. Konstitusi ini merekonstruksi Nepal menjadi tujuh provinsi serta menyelesaikan transisi Nepal dari monarki konstitusional ke republikanisme dan dari sistem kesatuan ke federalisme. Nepal didefinisikan dalam pasal 4 sebagai negara republik demokratis yang independen, bersatu, berdaulat, sekuler, inklusif, demokratis, berorientasi sosial, dan terorientasi. Hak-hak gender dan minoritas seksual dilindungi oleh konstitusi baru dengan ketentuan undang-undang khusus untuk melindungi, memberdayakan dan mengembangkan kelompok minoritas serta memungkinkan mereka untuk

mendapatkan kewarganegaraan dalam jenis kelamin yang mereka pilih. Hak-hak perempuan secara eksplisit diakui, konstitusi yang menyatakan bahwa "perempuan akan memiliki hak leluhur yang sama tanpa diskriminasi berbasis gender."

Penggantian dari satu agama ke agama lain tidak diperbolehkan dan tindakan yang melemahkan atau membahayakan agama orang lain dilarang. Pada saat yang sama konstitusi menyatakan bangsa menjadi sekuler dan netral terhadap semua agama. Nepal juga tidak mendukung adanya hukuman mati. Nepal telah menghapus hukuman mati pada tahun 1990 setelah dikeluarkannya Konstitusi Kerajaan Nepal tahun itu.

Pengesahan konstitusi baru segera menyebabkan kemunculan blokade virtual dari semua pos-pos pemeriksaan di perbatasan Nepal-India. Berbagai Aktivis Hak Asasi Manusia dan beberapa kelompok etnis di dataran rendah Nepal telah menuduh Konstitusi menjadi diskriminasi gender terutama dalam hal ketentuan kewarganegaraan. Mereka menuduh konstitusi baru membuat sulit bagi perempuan untuk mewariskan kewarganegaraan kepada anak-anak mereka dibandingkan dengan laki-laki.

Demikian pula, Madhesi dan penduduk pribumi melihat bahwa konstitusi baru gagal untuk menangani tuntutan masyarakat yang terpinggirkan dan mendukung status quo dari kelompok yang berkuasa. Mereka melakukan protes terutama atas pembatasan wilayah baru sebagaimana diusulkan dalam konstitusi yang khawatir demarkasi yang ada dapat mempengaruhi representasi politik mereka. Dengan protes yang berlangsung sejak 15 Agustus 2015 atau sebelumnya, setidaknya 45 orang, termasuk 8 personel keamanan dan satu warga negara India, telah tewas.

Human Rights Watch telah mengkritik Pemerintah Nepal serta para pengunjung rasa atas pelanggaran hak asasi manusia selama protes. Selain itu,

ada kontroversi mengenai pemerintah Nepal yang dituduh melakukan penistaan secara tidak langsung kepada agama Hindu di mana dengan konstitusi demokrasi ini makin membebaskan masyarakat Nepal mengonsumsi sapi, sebagaimana diketahui sapi adalah hewan suci bagi masyarakat Hindu serta pengurangan wilayah dengan perbatasan yang baru membuat masyarakat ini sangat tidak puas terhadap konstitusi barunya.